

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

Agustina, Shinta,dkk, *ObstructionofJustice, Tindak pidana menghalangi proses hukum*, ThemisBooks, Jakarta, 2015,

Andrea Kendal dan Kimberly Cuff, *ObstructionofJustice*, Spring, The American Criminal Law Review, 2008

Ali, Mahrus., *Asas, Teori dan PraktekHukum Pidana Korupsi*, UII Press,Yogyakarta, 2013.

Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*,Mandar Maju, 2004

Aburaera Sukarno, Muhadar, Maskun.,*Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, EdisiPertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Djaja, Ermansjah., *Tipologi Tindak PidanaKorupsi Di Indonesia Tujuh Tipe TindakPidana Korupsi Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001*,Mandar Maju, Bandung, 2010.

Darwin, Philips., *Money Laundering CaraMemahami Dengan Tepat dan BenarSoal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta,2012.

Djaja, Ermansjah., *Memberantas KorupsiBersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*,Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Sinar Grafika,Jakarta, 2013.

- Effendy, Marwan., *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-
isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta,
2012.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-6,
Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hafidz Arsyad, Jawade., *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum
Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
_____*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2005.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing , St.
Paul, 1990
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo., *Delik-Delik Khusus Kejahatan
Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*,
Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New
York : Russel Sage Foundation, 1986
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
_____, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-
3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 1997

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

NirwantoAndhi, D., *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.

Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBH dan PSHK, Jakarta, 2007.

Rahardjo, Satjipto., *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Seri Buku Tempo: Penegak Hukum., *KPK Tak Lekang*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2013.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Themis Books, Jakarta, 2005

Sudarto., *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996,

Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-14, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006,

Yopie Morya, Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012

Yusuf, Muhammad., *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Lembaran Negara R.I Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3080.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara R.I Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2958.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3874.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4150.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara R.I Tahun 2006 Nomor 32
Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4620.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara R.I Nomor 4250.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara
R.I Nomor 5074

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 684K/Pid.Sus/2009

Putusan Pengadilan Negeri 24/Pid.B/ TPK/ 2011 PN.Jkt.Pst

Jurnal

Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 141.

Internet

Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus
Korupsi* [http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-
dalam-kasus-korupsi.html](http://jambiupdate.com/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html), diakses pada 15 Desember 2017